

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan tidak memiliki kemampuan dasar manusiawi untuk menunjang keberlanjutan hidup.¹ Kemudian daripada itu kemiskinan menurut UNDP terbagi kedalam empat bentuk, yaitu kemiskinan pendapatan, kemiskinan manusia, kemiskinan kebutuhan dasar dan kemiskinan kemampuan.

Kemiskinan juga merupakan masalah pokok disuatu Negara, baik itu kemiskinan secara struktural, cultural dan natural. apalagi di Negara-negara yang sedang berkembang. Di negara sedang berkembang kemiskinan adalah pekerjaan nomor satu pemerintah yang harus segera diatasi dan harus segera di selesaikan.

Tren atau kecenderungan kemiskinan di dunia telah semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang mengalami kesulitan dalam memenuhi masalah pangan dan kebutuhan gizi diperkirakan akan mengalami peningkatan. Kira-kira dari 1,1

¹ Definisi Kemiskinan menurut UNDP. <http://www.scribd.com/doc/44466968/Pembangunan-dan-Kemiskinan-Perempuan-di-Kota>. Di akses pada tanggal 15 April 2011.

milyar pada tahun 1998 menjadi 1,13 milyar pada tahun 2008.² Selain itu juga banyak bentuk-bentuk kemiskinan yang lain.

Melihat kenyataan yang ada, banyak bermunculan aksi protes dari berbagai kalangan aktivis yang bertujuan untuk membuka mata para pemimpin dunia agar segera menindaklanjuti masalah-masalah kemiskinan yang kian marak ini. Kampanye dan aksi protes ini telah lama dimulai, sejak tahun 1995 hingga pada akhirnya pada tahun 2000 PBB menyelenggarakan sebuah deklarasi penting yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian muncullah program Millenium Development Goals sebagai program untuk memerangi kemiskinan di dunia.

Pada Millenium Summit bulan September tahun 2000, tidak kurang dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) kepala Negara dari seluruh dunia, termasuk Presiden Indonesia, berkumpul di KTT Millenium PBB di New York dan menandatangani deklarasi Millenium sepakat bahwa prioritas pembangunan dalam lima belas tahun ke depan menganut sasaran dan Negara-negara mereka untuk melakukan kemitraan global baru untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dan menetapkan sebagai target terikat waktu, dengan batas waktu 2015, yang telah dikenal sebagai Millenium Development Goals.

Tujuan Pembangunan Millenium adalah target dunia terikat waktu dan terukur untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di setiap Negara. Prioritas utama dari target MDG,s adalah pengentasan kemiskinan dengan dua sasaran utama yaitu

² United State Departement of Agriculture, Food Security Assesment. 1999.

menurunkan dari separo penduduk yang penghasilannya kurang dari 1 dolar AS perhari pada tahun 2015. Sasaran kedua adalah menurunkan menjadi separo jumlah penduduk yang menderita kelaparan pada tahun 2015. Jika kita ingin meninjau lebih jauh lagi sub-sahara Afrika adalah pusat krisis, kemiskinan kelaparan, serta tingkat kematian ibu yang cukup tinggi. Dan jumlah orang meninggal di daerah yang kumuh, serta mewabahnya penyakit kolera. Asia adalah wilayah dengan kemajuan tercepat, tapi masih ada ratusan juta orang yang masih berada dalam kemiskinan ekstrim. Inilah yang harus di atasi oleh setiap pemerintah Negara.

Dengan menandatangani Deklarasi Millenium pemimpin dunia berjanji untuk mengurangi jumlah proporsi orang yang menderita kelaparan, memastikan bahwa anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar, menghapuskan disparitas gender, pada semua tingkat pendidikan, mengurangi balita dan tingkat kematian bayi oleh dua pertiga, dan membagi dua proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air yang di perbaiki pada tahun 2015.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen yang di buat dalam Millenium Summit, setiap Negara yang menandatangani di harapkan untuk mempersiapkan laporan Millenium Development Goals. Pemerintah Indonesia dibawah BAPENAS dan dengan dukungan teknis dari PBB Task force, telah menyelesaikan laporan MDGs. Laporan ini merupakan upaya awal pemerintah untuk mengambil stok situasi pembangunan manusia Negara itu, terkait dengan target MDGs, mengukur dan menganalisa kemajuan menuju realisasi mereka, dan mengidentifikasi dan

review kebijakan dan program yang dibutuhkan untuk memenuhi target. Selain dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman dan apresiasi terhadap MDGs oleh masyarakat Indonesia, laporan itu biasa di gunakan sebagai alat advokasi oleh parlemen nasional dan lokal, masyarakat sipil dan media dalam mempromosikan kebijakan, program dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan target MDGs 2015.

Beberapa tahun yang lalu, dalam pidato pelantikan Presidennya, SBY mengutarakan beberapa agenda yang akan dilakukan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Salah satu Agenda yang diberikan perhatian khusus adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika dilihat dari agenda yang diberi perhatian khusus adalah kesejahteraan rakyat, maka hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar penduduk Indonesia. Indikator utama masih rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan.

Kondisi kemiskinan di Indonesia Pada tahun 2004, sebesar 36,2 juta (16,6%). Angka ini sempat turun pada tahun 2005 menjadi 35,1 juta (16%). Namun naik lagi pada tahun 2006 menjadi 39,3 juta (17,8%) karena dipicu kenaikan harga BBM pada tahun 2005 sehingga pada tahun itu jumlah penduduk di Indonesia naik sebesar 1,8%. Kemudian sejak tahun 2007 hingga 2009 trend angka kemiskinan terus menurun dan telah menyentuh angka 32,5 juta (14,2%) pada tahun 2009 ini³. dan hingga tahun 2010 kemiskinan di Indonesia masih mencapai

³ Sumber: BPS (di sadur dari batubara 2008).

sekitar 31,02 juta⁴. Dilihat dari jumlah penduduk miskin yang berada di Indonesia, sebenarnya pemerintah sudah dapat menurunkan/mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada. Namun jika mengacu pada target MDGs yang hendak dicapai oleh Indonesia, maka angka ini belum menunjukkan bahwa target MDGs dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk sudah bisa tercapai. Karena target yang ditetapkan oleh PBB dalam program Millenium Development Gols adalah mengurangi separo dari jumlah penduduk miskin yang ada dalam kurun waktu 15 tahun, yaitu mulai dari tahun 2000 hingga tahun 2015. Melihat kenyataan diatas maka target yang ingin dicapai oleh Indonesia belumlah berhasil.

Masih ingat dengan pidato kenegaraa Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2010, yang mana pada waktu itu presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakan “kita harus bekerja keras lagi untuk mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yang telah kita sepakati”⁵. Dengan pidato tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah telah siap dan bekerja keras untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk sesuai dengan target MDGs.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Millenium Development Goals 2015. Sejumlah kebijakan dan program Nasional pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Keluarga, Pemerataan pendidikan dasar, jaminan social dan jaminan kesehatan, dan peningkatan kesehatan masyarakat telah di luncurkan.

⁴ Pidato kenegaraan dan iptek MDGs, Kompas, Rabu, 18 Agustus 2010.

⁵ Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sidang Paripurna DPR dan DPD, Jakarta 16 Agustus 2010

Negara Indonesia merupakan Negara miskin yang ikut menandatangani deklarasi Millenium, atau Millenium Development Goals. Menurut PBB bahwa standar kemiskinan yang digunakan adalah pendapatan yang dibawah 1\$ dolar per hari dari penghasilan setiap individu.⁶ Dilihat dari standar penghasilan per hari yang di gunakan PBB maka Negara Indonesia masih termasuk dalam kategori Negara miskin, yaitu yang memiliki rata-rata penghasilan penduduk lebih rendah dengan Negara-negara lainnya sedangkan target dalam MDGs adalah mengurangi separo dari penduduk miskin yang berpenghasilannya dibawah standar kemiskinan internasional.

Maka dengan di tandatanganinya deklarasi Millenium pemerintah Indonesia ingin mengurangi jumlah kemiskinan penduduk Indonesia, sesuai dengan yang telah ditetapkan PBB dalam Millenium Development Goals.

Sejak awal kemerdekaanya pada tahun 1945, Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam Undang-undang dasar pada alenia ke-4 tahun 1945. Program-program yang dilaksanakan pada saat ini juga telah mendukung untuk terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Meskipun demikian masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang berkelanjutan di negara ini. Bahkan secara umum kita melihat pada partai-partai pemilihan umum di Indonesia pada tahun 2004 mencantumkan bahwa program kemiskinan harus segera diatasi dan diselesaikan.

⁶ Laporan BAPPENAS dalam pencapaian pembangunan Millenium di Indonesia 2010. Program penanggulangan kemiskinan

Pada tahun 2009/2010 di era pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan beberapa program untuk mengurangi angka kemiskinan, program-program ini diciptakan supaya Indonesia dapat mencapai target yang sudah di canangkan dalam MDGs. program-program populis seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), PNPM (Program pemberdayaan Masyarakat Mandiri), dan Raskin (Subsidi Beras untuk orang Miskin).

Namun secara garis besar, program-program ini merupakan program yang bersifat *short-run* dan hanya memiliki *multiplier effect* yang rendah karena hanya dapat mereduksi gejala kemiskinan sesaat. Padahal, masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural, bukan permasalahan atau fenomena sesaat. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak semudah seperti memutar telapak tangan. Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan di Indonesia harus mendapatkan perhatian ekstra serius dari pemerintah.

Hal ini cukup penting mengingat konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap warga negaranya, terutama orang miskin. Adanya program-program populis yang diterapkan oleh pemerintah belum bisa mengurangi tingkat kemiskinan secara maksimal.

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs merupakan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan masyarakat dunia. Karena itu MDGs merupakan acuan penting dalam

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarus utamakan MDGs dalam Rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN 2005-2015), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJNM) 2014-2009 dan 2010-2014), Rencana program kerja Tahunan (RKP), serta Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)⁷.

Meski pemerintah sudah menerapkan beberapa komitmen dan kebijakan untuk mencapai target MDGs, Namun kinerja pemerintah Indonesia untuk mengurangi jumlah kemiskinan penduduk sebagaimana yang ditargetkan dalam program MDGs dinilai masih lamban dan belum bisa maksimal. Karena pencapaian Millenium Development Gols di Indonesia hingga tahun 2010 baru mencapai 24% dari target yang ingin di capai.⁸

Hal ini dapat dilihat karena terdapat kelemahan dalam pelaksanaan MDGs di Indonesia, ini dapat dilihat dari tingginya jumlah dan presentase angka kemiskinan yang ada di Indonesia serta kesejahteraan rata-rata penduduk Indonesia yang masih jauh tertinggal dengan Negara-negara ASEAN. Jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya mapu dikurangi 10 hingga 30%, sedangkan

⁷ Laporan BAPPENAS dalam pencapaian pembangunan Millenium di Indonesia 2010. Program penanggulangan kemiskinan.

⁸ kata Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), M Jusuf Rizal di sela pembukaan Seminar International NGO's (Non Governmental Organization) di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (27/10).

target yang sudah disepakati dalam program MDGs adalah mampu atau dapat mengurangi separo dari jumlah penduduk miskin yang ada di negara Indonesia.⁹

Sedangkan bukti nyata bahwa kesejahteraan penduduk Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut, ketika penulis berkunjung ke Kuala Lumpur pada tahun 2010 Penduduk Negara Malaysia rata-rata berkehidupan layak dan serba kecukupan, bahkan di pusat kota-kota tidak ada pengemis, pengamen dan sebagainya. Kota-kotanya bersih, megah, dan gedungnya besar-besar. Sedangkan rakyat yang berpenghasilan kecil ditanggung oleh pemerintah Malaysia.¹⁰

Angka-angka dan uraian diatas bisa menunjukkan bahwa usaha Indonesia untuk mencapai target MDGs belum maksimal, belum bisa tercapainya target yang hendak di capai oleh Indonesia dalam mencapai program MDGs untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi setengahnya disebabkan karena Indonesia mengalami hambatan-hambatan dalam mencapai program tersebut.

Hambatan-hambatan ini berasal dari internal dan eksternal. internal yaitu penghambat yang berasal dari dalam negeri itu sendiri seperti keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan, minimnya anggaran pemerintah dalam subsidi kepada orang-orang miskin untuk program MDGs, kebijakan pemerintah yang cenderung pro asing, dan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar negara Indonesia.

⁹ Tujuan pembangunan Millenium yang ke satu, lihat http://www.undp.or.id/unv/id/resources_mdg.html, *Tujuan Pembangunan Millenium*. Diakses pada tanggal 6 maret 2011.

¹⁰ Apren Tice Trip (APT) 22 Juli-26 Juli, Malaysia-Sigapore.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk memaparkan Apa yang menjadi hambatan eksternal Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk sebagai target MDGs.
- b. Untuk mengkaji hambatan-hambatan Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk khususnya hambatan eksternal.
- c. Menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan praktek yang terjadi di dalam negeri dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan melaksanakan program MDGs.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

Apa Hambatan eksternal yang dialami Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk sebagai prioritas utama dalam mencapai program MDGs 2015?

D. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

1. Teori Dependensia

Salah satu asumsi dasar yang di kemukakan Andre Gunder Frank dalam teori dependensia adalah adanya interaksi Negara metropolis akan berkembang cepat sedangkan Negara satelit akan semakin terbelakang. Negara-negara pinggiran atau satelit ini dijadikan daerah koloni dari negara-negara kapitalis yang berfungsi sebagai penyedia raw material bagi kebutuhan industrinya¹¹. Dan akhirnya negara-negara pinggiran ini akan menjadi konsumen bagi produk-produk industri negara-negara kapitalis. Dan inilah yang menimbulkan struktur ketergantungan yang merupakan penghambat utama dalam perkembangan pembangunan ekonomi di negara negara pinggiran.

Teori dependensia sesuai dengan namanya berusaha menjelaskan tentang ketergantungan. Dalam hubungan ketergantungan tersebut ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak dominan dan pihak bergantung (dependen). Frank mengelompokkan negara-negara didunia ini atas dua kelompok yaitu negara metroplis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang. Hubungan ketergantungan seperti ini disebut Frank sebagai Metropolis-satelite relationsip. Sementara fokus hubungan ketergantungan dalam model Frank adalah bangsa-bangsa dan hubungan antar bangsa-bangsa, *ruang lingkup teorinya adalah sistem*

¹¹ http://denohervino.multiply.com/journal/item/6/Teori_Dependensia?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

kapitalis dunia. Dalam model yang dikembangkan Frank, tiap titik dalam rantai metropolis-satelit, struktur rantai menciptakan kepentingan objektif tertentu, dan yang paling penting adalah kepentingan dalam mengontrol hubungan monopoli pada tiap titik di rantai hubungan tersebut demi memperoleh manfaat dari extractive power yang ada pada posisi tersebut. Menurut Frank keterbelakangan dinegara-negara dunia ketiga hanya bisa dipahami dengan mengetahui kondisi awal, khuluk dan perkembangan dari kapitalisme.

Menurut Andre Gunder Frank hubungan ketergantungan, dan hubungan metropolis- satelit dalam suatu sistem kapitalisme dunia, dicirikan oleh sifat monopolistik dan ekstraktif. Metropolis memiliki kontrol monopolistik atas hubungan ekonomi dan perdagangan di negara-negara satelit. Dominasi monopolistik dalam suatu pasar jelas merupakan sebuah posisi kekuasaan.

Posisi kekuasaan ini memungkinkan negara-negara metropolis mengeruk surplus ekonomi dari negara-negara satelit. Sebagai dampak dari dominasi metropolis tersebut, negara-negara satelit tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi sendiri, melainkan tetap tergantung pada metropolis. Menurut Frank, hubungan monopolistik dan ekstraktif pada awalnya dibentuk melalui kekuatan senjata, dan setelah itu dilanjutkan melalui struktur ketergantungan dan keterbelakangan.

Sehubungan dengan pola hubungan antara negara –negara metropolis maju dan negara-negara satelit yang terbelakang, Andre Gunder Frank membuat hipotesis:

- a. Dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang terbelakang, pihak metropolis akan berkembang dengan pesat sedangkan pihak satelit akan tetap dalam posisi keterbelakangan.
- b. Negara-negara miskin yang sekarang menjadi negara satelit, perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom bila tidak terkait dengan metropolis dari kapitalis dunia, atau kaitannya sangat lemah.
- c. Kawasan-kawasan yang sekarang sangat terbelakang dan berada dalam situasi yang mirip dengan situasi dalam sistem feodal adalah kawasan-kawasan yang pada masa lalu memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dari sistem kapitalis internasional. Kawasan-Kawasan ini adalah kawasan penghasil ekspor bahan mentah primer yang terlantar akibat adanya hubungan perdagangan internasional.

Adanya hubungan ketergantungan yang sifatnya asimetris ditunjukkan oleh hubungan antara pihak-pihak yang tidak seimbang, disebabkan karena pembangunan-pembangunan daerah satelit tergantung pada pembangunan metropolis. hubungan yang timpang dan tidak seimbang ini juga disebabkan karena negara-negara metropolis memiliki kekuasaan atas jalannya pembangunan di daerah-daerah satelit dan bukan sebaliknya. Kunci hubungan ketergantungan

dengan demikian adalah Kontrol. Tegasnya metropolis memiliki kekuasaan lebih besar karena dapat mengontrol hubungan dengan satelit.

Bagi Andre Gunder Frank hubungan ketergantungan adalah hubungan eksploitatif dimana negara-negara metropolis menghisap negara-negara satelit. Akibatnya metropolis akan semakin maju sedangkan negara-negara satelit akan tetap dalam posisi keterbelakangan tertinggal dan tidak berkembang. Frank pernah menyampaikan pendapatnya bahwa¹² Alasan dari kegagalan negara pinggir untuk maju seiring dengan negara sentral. Kegagalan ini disebabkan oleh adanya eksploitasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang dilakukan oleh negara sentral. Santos mengamsusikan bahwa bentuk dasar ekonomi dunia memiliki aturan-aturan perkembangannya sendiri, tipe hubungan ekonomi yang dominan di negara sentral adalah kapitalisme sehingga menyebabkan timbulnya usaha melakukan ekspansi keluar dan tipe hubungan ekonomi pada negara pinggir merupakan bentuk ketergantungan yang dihasilkan oleh ekspansi kapitalisme oleh negara sentral.

Teori dependensi menjelaskan bagaimana timbulnya kapitalisme yang dapat menguasai sistem ekonomi dunia. Keterbatasan sumber daya alam pada negara maju mendorong mereka untuk melakukan ekspansi besar-besaran pada negara miskin. Pola yang dilakukan memberikan dampak negatif berupa adanya ketergantungan yang dialami oleh negara miskin. Negara miskin akan selalu

¹²

<http://prayudho.wordpress.com/2008/12/05/teori-dependensia/>

menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju.

Konsep *underdevelopment* yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank merujuk kepada satu situasi yang secara fundamental berbeda dari *undevelopment*. *Undevelopment* merujuk kepada keadaan yang mana sumber (di suatu negara) tidak digunakan. Sebagai contoh, penjajah Eropa melihat benua Amerika Utara sebagai kawasan yang tidak maju karena tanahnya tidak digunakan dalam skala yang konsisten dengan potensinya.

Adapun *underdevelopment* merujuk kepada situasi yang mana sumber-sumber secara aktif digunakan, tetapi digunakan melalui cara yang hanya menguntungkan negara-negara dominan dan bukannya negara-negara miskin yang merupakan pemilik dari sumber-sumber tersebut¹³. Oleh karena itu, negara-negara miskin bakal tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara kaya dan mereka miskin bukan karena mengabaikan aspek transformasi ilmu pengetahuan, tetapi kemiskinan lebih dikarenakan dipaksa memasuki sistem ekonomi internasional. Secara ringkas, teori ketergantungan mencoba untuk menjelaskan situasi negara-negara yang keterbelakangan (*underdeveloped*) dengan menganalisis pola-pola interaksi di berbagai negara dan dengan menjelaskan bahwa ketidakmerataan di berbagai negara adalah bagian dari adanya interaksi tersebut. Pada intinya apa yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank dengan teori ketergantungannya

¹³ <http://himasos.blog.friendster.com/tag/teori-ketergantungan/>

(1980) menegaskan bahwa *underdevelopment* adalah produk kapitalisme dengan mengkaitkan kapitalisme kepada sistem dunia yang saling berkaitan. Melalui monopoli dan eksploitasi bahwa “mewujudnya keterbelakangan” (*development of underdevelopment*) adalah proses yang sedang berjalan di Amerika Latin dan masih belum berubah sejak penaklukan Spanyol dan Portugis pada abad ke-16. Lebih lanjut Andre Gunder Frank berargumen bahwa ekonomi kapitalis dunia telah menembus Amerika Latin dengan begitu mendalam sehingga tidak ada bagian benua tersebut yang tidak “terjajah”. Ia memberikan contoh sektor pertanian di Brazil yang telah berubah menjadi industri untuk ekspor. Gunder Frank juga merumuskan apa yang dikenal dengan struktur model satelit-metroplis (*a metropolis-satellite model*) untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ketergantungan dan keterbelakangan Negara-negara Dunia Ketiga wujud. Hubungan satelit-metropolis pertama kali lahir di masa kolonial, ketika penjajah membangun kota-kota di Negara Dunia Ketiga dengan maksud untuk memfasilitasi proses pengambilan surplus ekonomi untuk negara Barat.

Hubungan metropolis-satelit tidak hanya pada tingkat hubungan internasional saja, tetapi juga berlaku untuk memahami hubungan regional dan lokal di dalam Negara Dunia Ketiga. Keseluruhan rangkaian hubungan metropolis-satelit ini dibangun semata hanya untuk melakukan pengambilan surplus ekonomi (bahan mentah, tambang, dagangan, laba, dsbnya) dari kota di pedesaan Dunia Ketiga ke ibukota daerah yang lebih besar, ke kota propinsi, dan selanjutnya ibukota nasional, dan yang terakhir ke kota-kota di negara Barat.

Oleh karena itulah bagi Gunder Frank proses pengambilan surplus ekonomi secara nasional dan global serta terarah inilah yang menyebabkan keterbelakangan di Negara Dunia Ketiga. Tidak hanya itu, Andre Gunder Frank juga melihat rantai hubungan metropolis-satelit ini telah terbentuk sejak abad ke-16 dan walaupun ada perubahan hanya dari segi bentuk eksploitasi dan penguasaan terhadap negara satelit. Olehnya hal ini dinamakan sebagai satu prinsip kesinambungan di dalam perubahan atau "*continuity in change*". Namun demikian, pada teori Gunder Frank ini ada tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu modal asing, pemerintah lokal di negara-negara satelit, dan kaum borjuis. Berdasarkan tiga komponen utama ini, ciri-ciri dari perkembangan kapitalisme satelit adalah; **a)** kehidupan ekonomi yang tergantung, **b)** terjadinya kerjasama antara modal asing dan kelas-kelas yang berkuasa di negara-negara satelit, yaitu pejabat pemerintah, tuan tanah dan pedagang, dan **c)** ketimpangan antara yang kaya dan miskin.

Suatu negara memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang masih bergantung pada negara lain, ada yang sebatas mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan ada yang telah mampu memberi bantuan kepada negara lain. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengelompokan-pengelompokan negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya. negara-negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis ataupun Jerman disebut sebagai negara maju. Kemajuan negara-negara tersebut dapat dilihat dari banyaknya kota-kota metropolitan yang dicirikan dengan kondisi fisik berupa banyaknya bangunan atau gedung-gedung tinggi sebagai kawasan industri dan perkantoran. Hal tersebut

dikarenakan mayoritas negara maju perekonomiannya bertumpu pada sektor industri, jasa dan perdagangan. Adapun negara-negara seperti Afrika Selatan, India, Pakistan, Laos, Malaysia, dan Indonesia disebut negara berkembang. Negara berkembang pada umumnya bercorak agraris, karena masih banyak ditemui lahan pertanian yang luas dan subur.

Pemanfaatan kekayaan alam yang dimiliki Negara Indonesia belum mampu dioptimalkan. Sehingga Dalam pemanfaatannya, negara Indonesia masih bekerja sama dengan negara maju dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki. Kerja sama dalam mengeksploitasi sumber daya alam di Negara Indonesia bisa kita lihat pada perusahaan Freeport yang berada di Papua. Perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan yang berada di Papua/Irian Jaya, namun dalam eksploitasi pertambangannya Indonesia bekerjasama dengan Amerika untuk mengelola hasil dari sumber daya alam tersebut. dalam kenyataannya Amerika lebih mendominasi dalam urusan pengelolaan pertambangan di perusahaan Freeport, tentu ini akan sangat menguntungkan bagi pihak Amerika yang lebih dominan dan memiliki sifat monopolistic terhadap Negara pimggiran (Indonesia) dalam kerja sama mengelola sumber daya alam. Di sisi lain dengan adanya kerja sama dengan Amerika dalam mengelola sumberdaya alam dapat merugikan bangsa Indonesia selain adanya ketergantungan terhadap Negara maju juga menjadikan ekonomi Negara semakin melemah.

Untuk Hasil sumber daya alam ini pada akhirnya dijadikan komoditas perdagangan (ekspor) karena belum memiliki teknologi untuk mengolahnya lebih

lanjut. Oleh karena itu, Negara Indonesia masih mengandalkan ekspor dari hasil alam mentah.

Dalam teori dependencia Negara maju menguasai hubungan ekonomi dan perdagangan di Negara-negara satelit, sehingga Negara maju dapat terus maju dan meningkatkan hasil produksinya untuk pembangunan di negaranya, sedangkan bagi Negara satelit akan semakin terbelakang, Karena hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah bagi kebutuhan industri di Negara maju, yang nantinya dijual kembali ke Negara pinggiran dengan harga yang jauh lebih mahal.

Seperti yang di ungkapkan oleh Andre Gunder Frank dalam hipotesis yang ketiga bahwa Negara yang terbelakang adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat luas dan penghasil ekspor bahan mentah ke Negara maju atau Negara industri. Negara terbelakang ini bisa penulis contohkan adalah Negara Indonesia. Posisi Indonesia pada saat ini adalah negara pengekspor bahan mentah keluar negeri seperti: tambang, gas, minyak bumi, bahan baku industri (tekstil), bahan mentah sumber daya alam seperti kayu, hasil produksi pertanian, dan lain sebagainya. Kejadian ini akan menimbulkan beberapa hal seperti:

1. Ketersediaan bahan baku dan energi di Indonesia
2. Tidak berkembangnya kemampuan mengolah bahan baku energi dan bahan baku industri
3. Ketergantungan dari pasar ekspor

Dari uraian diatas maka yang perlu kita ketahui adalah system ekonomi dan perdagangan saat ini terintegrasi dalam satu institusi atau satu system kapitalisme. Jadi tidak mungkin menilai dengan melepaskan konteks kapitalisme tersebut. Bagaimana Negara ini bisa berkembang jika terjadi liberalisasi di pasar dalam negeri, bagaimana bisa berkembang andaikata pemerintah memenuhi aturan WTO yang mengharuskan mengimpor barang jadi dan mengekspor bahan mentah, pajak tinggi untuk ekspor sementara harus menghapuskan pajak untuk serbuan ekspor barang jadi luar negeri.

E. Hipotesis

Hambatan eksternal yang dialami Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk sebagai target untuk melaksanakan program MDGs 2015 adalah Lembaga Keuangan Internasional.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan data yang berupa pernyataan, statement yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif untuk dijadikan variabel pemahaman. Teknik analisisnya secara deskripsi eksplanatoris yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang aktual. Kemudian memberikan penjelasan yang obyektif menurut data dan fakta yang tersedia, menghubungkan antar factor sebagai unit analisis, dan menginterpretasikannya untuk mencapai kesimpulan. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan data sekunder melalui

study pustaka (*Library Reaserch*) dengan bahan pustaka seperti buku, jurnal, bulletin, surat kabar, serta media internet untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, actual dan relevan.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini mengambil rentang waktu semenjak di tandatanganinya program Millenium Development Gols, yaitu pada tahun 2000 hingga sepuluh tahun berjalannya MDGs di Indonesia yaitu tahun 2010.

H. Sistematika Penulisan.

BAB 1. Merupakan bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan ilmiah, yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2. Membahas tentang kemiskinan merupakan masalah di negara Indonesia. Dengan pokok bahasan yang meliputi: kemiskinan, factor penyebab kemiskinan, kemiskinan di Indonesia. Dan penanggulangan terhadap kemiskinan di Indonesia.

BAB 3. Membahas tentang Millenium Development Goals sebagai program memerangi kemiskinan (MDGs) di Indonesia dengan pokok bahasan yang meliputi: sejarah terbentuknya Millenium Development Goals, Delapan Tujuan MDGs, Sosialisasi Program MDGs di Indonesia, Pelaksanaan Program Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia.

BAB 4. Membahas Hambatan eksternal Indonesia dalam mengurangi kemiskinan penduduk sebagai Tujuan Pembangunan Millenium, yang meliputi Adanya ketergantungan Indonesia dengan negara maju, adanya krisis ekonomi global, Masuknya MNC di Indonesia, dan kegagalan resep IMF dalam kebijakan pangan di Indonesia.

BAB 5. Berisikan kesimpulan dari seluruh hal-hal yang di kemukakan pada bab-bab sebelumnya.